

LAMPIRAN IV. : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 04 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD dan PPKD.

1. Fungsi Akuntansi-PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
- b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. Nota Kredit;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat pembayaran bunga kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

E. ILUSTRASI

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bank “ABC”, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar Rp.500.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		2.2.1.01.0 1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		500.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.4.03.0 1	Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman Daerah dari Lembaga		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	500.000.000	
		7.1.4.01.0 1	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		500.000.000

b. Penerbitan Obligasi

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah ABC menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1000 lembar @Rp.500.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		2.2.1.03.0 1	Utang Dalam Negeri – Obligasi		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	500.000.000	
		7.1.4.03.0 1	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi		500.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.4.05.0 1	Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		500.000.000

c. Penerimaan Kembali Pinjaman

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar Rp.250.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
		1.1.4.02.0 2	Bagian Lancar Tagihan kepada BUMD		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	250.000.000	
		7.1.5.01.0 1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada Perusda		250.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	250.000.000	
		6.1.5.01.0 1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kepada Perusda		250.000.000

d. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun ke-5 dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Bukti Pemindah bukuan	1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000	
		1.4.1.01.0 1	Dana Cadangan		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Bukti Pindah bukuan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	10.000.000.00	
		7.1.2.01.0 1	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Bukti Pindah bukuan	0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL	10.000.000.00	
		7.1.2.01.0 1	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		10.000.000.000

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai Rp.300.000.000,00. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	1.2.2.01.0 2	Penyertaan Modal Kepada BUMD	300.000.000	
		1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.2.02.0 1	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal BUMD	300.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL		300.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	6.2.2.02.0 1	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Moda BUMD	300.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL		300.000.000

b. Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp.60.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	2.2.1.01.0 1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Bank ABC	60.000.000	
		1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.3.03.0 1	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank ...	60.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Peubahan SAL		60.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	6.2.3.03.0 1	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokoko Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	60.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL		60.000.000

c. Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan

terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.10.000.000.000,00, atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat jurnal:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	1.4.1.01.0 1	Dana Cadangan	2.000.000.000	
		1.1.1.01.0 1	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D LS	7.2.1.01.0 1	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000	
		0.0.0.00.0 0	Perubahan SAL		2.000.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

tttd

AGUSTIN TERAS NARANG